

# KEDUDUKAN PARTAI OPOSISI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Abdul Kadir Lafuil<sup>1</sup>, Kusnadi Umar<sup>2</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : lafuilabdulkadir99@gmail.com, kusnadi.umar@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan implikasi partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, display data dan editing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi pengaruh besar, karena memberikan stabilitas yang kondusif terhadap jalannya sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan partai oposisi dapat memberikan check and balances terhadap pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan dikritisi oleh partai yang berada diluar pemerintahan dengan bertujuan untuk mengimbangi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Sebab, partai koalisi yang berada di parlemen tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dengan demikian, keberlangsungan demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia, partai oposisi menjadi alternatif utama dalam menjalankan prinsip check and balances. Terdapat dalam perspektif siyasah syar'iyah, suatu kebijakan harus bermanfaat dengan mengedepankan kemaslahatan bersama, dan tidak diperuntukkan kepada sekelompok orang. Al-Qur'an dan hadis memerintahkan kepada setiap orang untuk berbuat adil dan jujur dalam menyampaikan amanat.

**Kata Kunci: Demokrasi; Partai oposisi; Sistem**

## ABSTRACT

*This study aims to determine the role of the opposition party in the sustainability of democracy in the Indonesian constitutional system, and the implications of the opposition party on the sustainability of democracy in the Indonesian constitutional system. The method used in the research is library research using a normative and syar'i juridical approach. Sources of data used in the form of primary data and*

*secondary data. Furthermore, data processing and analysis were carried out using three stages, namely: data reduction, data display and editing. The results of the study indicate that the existence of opposition parties to the sustainability of democracy in the Indonesian government system is a major influence, because it provides conducive stability to the operation of the Indonesian democratic system. The existence of opposition parties can provide checks and balances against the government, so that every policy made by the government can be controlled and criticized by parties outside the government with the aim of balancing government policies and the needs of the people themselves. This is because the coalition parties in parliament are not optimal in carrying out their duties and functions properly. Thus, for the continuation of democracy in Indonesia's presidential system, the opposition party becomes the main alternative in implementing the principle of checks and balances. In the *siyasa syar'iyah* perspective, a policy must be useful by prioritizing the common good, and not intended for a group of people. The Qur'an and Hadith instruct everyone to act fairly and honestly in conveying the message.*

**Keywords:** *Democracy; Opposition party; System*

## PENDAHULUAN

Sejak pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi suatu kendala yang sangat politis dan juga ideologis. Oleh karena itu, penerapan sistem demokrasi menjadi alternatif terbaik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang diterapkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia. Namun, pada proses pelaksanaan dalam keberlangsungan demokrasi terjadi pasang surut dari dinamika konstestasi politik Indonesia. Karena adanya berbagai dinamika perpolitikan yang terjadi baik itu dalam negeri maupun pengaruh dari luar negeri. Sehingga menggeser substansi dari demokrasi itu sendiri. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fakta selalu berbalik arah karena sistem politik dapat dipahami hanya pada situasi dan kondisi untuk diterapkan sebagai bentuk kepentingannya, dan hal itu sudah menjadi komitmen yang dipegang oleh para politikus. Maka, apapun kondisinya yang menganggap tidak menjadi bisa sekalipun dapat bertentangan dengan penegakan hukum itu sendiri.<sup>1</sup> Penerapan sistem ketatanegaraan Indonesia tampaknya telah masuk dalam dekade terburuk, terkhusus pada peralihan sistem kekuasaan dari presiden Soeharto kepada BJ Habibie pada 21 Mei 1998. Suatu perlakuan yang tidak diinginkan dalam sistem demokrasi Indonesia, dengan melakukan pemberian kekuasaan secara langsung. Rakyat Indonesia hanya mendapat peristiwa tersebut sebagai satu langkah awal yang buruk terhadap demokrasi Indonesia.<sup>2</sup>

Terdapat dalam keberlangsungan demokrasi, sistem presidensial membutuhkan adanya pengontrol untuk mengimbangi terhadap jalannya sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga badan eksekutif dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Langkah pasti yang bisa dilakukan sebagai

<sup>1</sup> Syafriyadi. "Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal UIR Law Review Volume 1*, no.1 (2017): 25-38.

<sup>2</sup> Abraham Amos. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005): 413.

*check and balances* untuk selalu mengontrol terhadap pemerintah adalah partai oposisi.<sup>3</sup> Kontekstualisasi oposisi dalam keberlangsungan demokrasi harusnya diselaraskan dalam realitas yang ada sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah dengan anggota parlemen yang berada diluar pemerintahan dapat berjalan bersamaan untuk selalu saling mengontrol terhadap setiap kinerjanya. Oleh karena itu partai oposisi harus diterapkan di negara Indonesia sebagai *check and balances* terhadap demokrasi dalam sistem presidensial. Tugas oposisi harus berpengaruh besar dalam memberikan pengawasan kepada pemerintah.<sup>4</sup>

Keberadaan partai oposisi memberikan pengaruh besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Setiap pemikir demokrasi dapat secara jelas mengatakan tentang pentingnya partai politik yang berperan sebagai oposisi.<sup>5</sup> Sebab, demokrasi yang baik pasti harus membutuhkan oposisi untuk keberlangsungan negara yang lebih baik kedepan. Terdapat dalam buku yang berjudul *Political Opposition in Western Democracies* karangan oleh Robert Dahl pada tahun 1965 dapat mengatakan bahwa dalam sistem politik negara yang demokratis apabila didalmnya ada partai oposisi, begitupun sebaliknya bahwa partai oposisi dapat bisa menjalankan tugas dan fungsinya hanya ada dalam sistem demokrasi. Seorang pemikir demokrasi yang bernama Ian Shapiro pada tahun 2003 juga dapat mengatakan bahwa dalam perkembangan demokrasi, oposisi sangat dibutuhkan sebagai pengontrolan terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan presidensial.<sup>6</sup>

Dinamika demokrasi Indonesia yang berproses sejak orde baru sampai pada masa reformasi selalu mengedepankan asas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu berlangsung di negara Indonesia dan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menikmati dinamika demokrasi politik sebagai salah satu bentuk proses politik. Namun, dibalik dari proses perpolitikan yang terjadi di negara Indonesia yang selalu berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat belum maksimal, bahkan jauh dari harapan keberhasilan dalam sistem presidensial di Indonesia. Oleh sebab itu, negara Indonesia dalam hal ini badan eksekutif dan juga legislatif bahkan berbagai elemen masyarakat menginginkan satu bentuk metode sebagai pengontrol dan pengawasan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Orientasi negara Indonesia adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana harapan yang dibuat sebelumnya yang belum maksimal. Oleh karena itu, di dalam sistem pemerintahan presidensial harus membentuk undang-undang tentang partai oposisi sebagai alternatif dari maju dan berkembangnya negara republik Indonesia sebagaimana cita-cita yang diharapkan. Dalam dinamika perpolitikan di Indonesia tampak semakin

<sup>3</sup> Firman Nur. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Indonesia Volume 42*, no. 1 (2016): 1-17.

<sup>4</sup> Mei Susanto. "Pelebagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia." *Jurnal Academia Volume 4*, no. 1 (2012): 87-100.

<sup>5</sup> Tuswojo Admojo. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014." *Jurnal Politik Volume 1*, no. 2 (2016): 284-315.

<sup>6</sup> Ratih K. Wardhani dan Kamarudin. "Peran Oposisi Yang Dimainkan Partai Islam di Era Reformasi (Studi Kasus : Peran Oposisi PKS Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)." *Jurnal Of Social Sciences and Humanities Volume 1* no. 1 (2021): 59-71.

menonjol terhadap keberlangsungan demokrasi dan membutuhkan pengontrol pemerintah adalah partai oposisi sebagai suara alternatif.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan kedaulatan rakyat tersebut partai oposisi menjadi pemicu besar pada pemerintah karena dalam tugas dan fungsi yang dilakukan oleh badan eksekutif selalu ada *check and balances* yang diperankan oleh partai oposisi. Pengontrol dan penyeimbangan kepada pemerintah adalah satu langkah pasti untuk menuju kemaksimalan kerja oleh lembaga eksekutif tersebut. Sebab, menelusuri dinamika perpolitikan yang terjadi di negara Indonesia, partai yang berkoalisi tidak mampu untuk bekerja dalam menciptakan harapan-harapan yang menjadi orientasi utama dalam prinsip bernegara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang ada saat ini dapat membuat rakyat sudah tidak percaya lagi, karena dalam menjawab kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. Adanya partai oposisi dapat membuat kepercayaan publik kembali yakin akan adanya pengontrol dan penyeimbangan terhadap jalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Peran yang selalu dilakukan oleh partai oposisi dalam mengawal pemerintah akan berdampak positif terhadap stabilitas yang kondusif pada berbagai lini kehidupan bernegara.<sup>9</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang kedudukan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menjelaskan seberapa besar pengaruh partai oposisi terhadap sistem pemerintahan dan mengetahui juga dari sisi dampak yang didapatkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni menggunakan bahan pustaka untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pokok untuk dikaji. Pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah yuridis normatif dan syar'i. Data penelitian yang diperoleh yakni berupa data primer dan skunder sebagai penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini. Sebagai langkah selanjutnya, data tersebut diolah dengan menggunakan deskriptif analisis untuk ditarik kesimpulannya.<sup>10</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Partai Oposisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak lahir begitu saja dalam suatu negara melainkan berbagai dinamika perpolitikan terjadi. Demokrasi lahir dari buah pikir orang-orang besar yang dikatakan sebagai pejuang di bangsa ini. Dengan demikian, sistem politik demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia,

<sup>7</sup> Abdul Wahid. *Hukum dan Oposisi*. (Bandung: Tarsito, 2013). 103-104.

<sup>8</sup> Firman Nur. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Indonesia Volume 42*, no. 1 (2016): 1-17.

<sup>9</sup> Dedi Zulkarnain Pratama. "Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia." *Jurnal Transformative Volume 1*, no.1 (2015): 69-77.

<sup>10</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2*, no. 1 (2020): 114-129.

dapat memberikan penjelasan dengan berdasarkan prinsip kebersamaan terhadap setiap manusia. Demokrasi menjadikan rakyat sebagai satu-satunya kedaulatan tertinggi.<sup>11</sup> Semenjak diamanatkan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia dinyatakan menganut sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, presiden dapat bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Karena presiden mempunyai kekuasaan dalam badan eksekutif dapat berkontribusi besar untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun, dalam kinerja yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendudukkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi untuk selalu memperhatikan hak dan tanggungjawabnya. Sebab, kesejahteraan dan keadilan dalam pengelolaan negara adalah prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang kepala negara.<sup>12</sup>

Penerapan sistem demokrasi presidensial membutuhkan partai politik yang berada di parlemen untuk selalu memantau jalannya keberlangsungan demokrasi. Dengan itu, menghadirkan partai koalisi yang berada dalam pemerintahan dan oposisi sebagai partai yang kalah dalam kontestasi politik mengambil langkah diluar pemerintahan. Terpenting yang harus dipahami tentang seberapa besar untuk memberikn aspirasi masyarakat untuk tetap percaya dalam merespon kebutuhan rakyat adalah adanya kedua partai yang berkerja sama dalam membentuk harapan-harapan yang di inginkan. Dalam partai koalisi ada namanya partai oposisi, artinya oposisi harus ada dalam setiap lembaga manapun untuk selalu mengontrol jalannya kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah. Partai oposisi hadir untuk menjawab tantangan yang dapat menjadi ancaman terhadap rakyat. Maka, oposisi sebagai representasi rakyat untuk memberikan kritikan dan juga pengontrolan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang untuk melahirkan kebijakan yang pada akhirnya dapat mementingkan saja kalangan tertentu.<sup>13</sup>

Negara demokrasi presidensial tidak mengatur secara konstitusi tentang partai oposisi. Namun, dalam sistem pemerintahan membutuhkan adanya *check and balances* yang berada diluar pemerintahan yang selalu untuk mengawal terhadap jalannya sistem demokrasi secara baik. Di Indonesia, oposisi dipahami sebagai instrumen politik yang selalu mengedepankan konsep demokrasi dan juga implementasi sikap kritis pada pemerintah. Kehadiran partai oposisi di negara Indonesia, untuk menjawab tantangan-tantangan yang selalu muncul dari pemerintah yang pada endingnya dapat meresahkan rakyat itu sendiri. Sebab, tanpa dikawal secara maksimal, maka kerja-kerja oligarki akan menyusup masuk di dalam kabinet untuk mengintervensi pemerintah, sehinga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu pada garis ketidakpastian yang diharapkan oleh rakyat. Karena kerja otoriter yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk sewenang-wenang untuk mementingkan beberapa kalangan saja. Oposisi adalah alternatif dari dinamika demokrasi di

<sup>11</sup> Suparman Marzuki. Politik Hukum. (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2014): 14.

<sup>12</sup> Bernardinus Putra Benartin dan Paulus Wisnu Yudhoprakosa. "Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial DI Indonesia." *Jurnal Gloria Justitia Volume 1*, no. 2 (2021): 176-191.

<sup>13</sup> Abdul Wahid. Hukum dan Oposisi. (Bandung: Tarsito, 2013): 113-114.

Indonesia. Artinya keberlangsungan demokrasi butuh pengimbangan yang kokoh untuk selalu memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif kepadanya.<sup>14</sup>

Keberadaan oposisi mutlak diperlukan. Sebab, sistem presidensialisme tidak pada apa yang sudah menjadi prinsip terpenting untuk dilakukan. Seperti menjadikan beberapa partai politik untuk beralih pada pengawasan agar sistem presidensial itu bisa terukur. Dalam sistem presidensialisme, rakyat menjadi *Government* atau ruling majority sekaligus, oposisi, oleh rakyat. Berbeda dalam parlementer, maka dalam sistem ketatanegaraan ini terlihat kekurangan sistem, presidensialisme dipahami sebagai parlementarisme, sehingga ketika ada partai politik yang karena mengusung calon presiden menjadi presiden, atau kemudian setelah presiden terpilih, ditarik kembali untuk diajak masuk dalam kabinet, dianggap itu sebagai koalisi pemerintah yang tidak boleh oposisi. padahal rakyatnya memberikan tugas kepada parlemennya atau legislatif untuk melakukan oposisi tersebut kepada eksekutif. Hal demikian itu sudah menjadi anomali yang terbentuk sekarang, ada yang sering di dapatkan ketika pemerintah terbentuk, dan ingin menarik sebanyak-banyaknya anggota partai untuk masuk kabinet agar tidak ada partai yang dapat mengkritik pemerintah, padahal parlemen atau DPR dan DPD juga tetap sama.<sup>15</sup>

Keberadaan partai oposisi di Indonesia terjadi setelah proses reformasi, dan menjelang beberapa tahun, problem yang dihadapi bangsa Indonesia cukup serius terhadap ancaman demokrasi. Dengan demikian, untuk mengaliri proses demokrasi dengan baik, maka pada tahun 2004 Megawati Soekarno Putri berkonstestasi politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono secara pemilihan langsung. Kemudian hasil dari pemilihan tersebut dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan kemenangan sistem demokrasi pertama yang menerapkan sistem pemilihan secara langsung. Oleh karena itu, Megawati mengambil satu langkah pasti sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sistem demokrasi Indonesia, akhirnya Megawati mengambil langkah sebagai oposisi untuk mengontrol jalannya tugas dan fungsi pemerintah. Progresifitas Megawati untuk mengkonsolidasikan dengan berbagai pendukungnya untuk membentuk satu partai yang di namakan PDI-Perjuangan. Maka, selama kepemimpinan SBY sebagai presiden selama dua periode partai PDI-Perjuangan tetap menjadi partai oposisi.<sup>16</sup>

Dengan berbagai dinamika politik yang dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemikir bangsa semenjak 2004. Disaat itu, pemilihan secara demokrasi dimulai dan sampai sekarang sangat membuahkan hasil yang maksimal, hanya saja bentuk implementasi dalam masyarakat tidak sama sekali dalam kemaksimalan yang diharapkan oleh setiap warga negara Indonesia.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, demokrasi yang tidak ada pengontrol dalam hal ini sebagai *check and balances* sama halnya dengan tirani dan oligarki. Maka

<sup>14</sup> Munadi. "Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia." *Jurnal Resolusi Volume 2*, no. 1 (2019): 1-20.

<sup>15</sup> Kancang Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: PT. Kencana Penada Media Grup, 2015): 112.

<sup>16</sup> Tuswojo Admojo. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu presiden 2014." *Jurnal Politik Volume 1*, no. 2 (2016): 284-315.

<sup>17</sup> Haerani Pratiwi dkk. "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Segiri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah Volume 3*, no. 1 (2022): 209-219.

perlu adanya partai oposisi untuk mengawasi setiap kinerja pemerintah sebagai bahan pertimbangan. Penerapan partai oposisi bukan mengindikasikan bahwa akan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, hanya saja sebagai satu langkah pasti menuju negara yang adil dan sejahtera, tidak cukup dengan mengharapkan partai yang berkoalisi dengan pemerintah, namun butuh pengkritikan dan juga pengawalan yang cukup agar cita-cita menjadi bangsa yang diharapkan akan tercapai.<sup>18</sup>

## 2. Partai Oposisi dan Masa Depan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dinamika proses pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya berupaya untuk bekerja keras demi rakyat dan negara Indonesia. Konsep negara mulai dari era moderen dan sampai pada era post-moderen seluruh dunia hanya mengenal tiga bentuk sistem pemerintahan, yakni sistem presidensial, sistem parlementer dan juga referendum yang menggunakan triaspolitika.<sup>19</sup> Konsep demokrasi merupakan suatu makna tersendiri yang terdapat dalam ilmu politik. Oleh karena itu, demokrasi menjadi alternatif terhadap perkembangan politik di negara Indonesia.<sup>20</sup> Dinamika perpolitikan bangsa Indonesia, tentang banyak golongan yang berupaya untuk merebut kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Berbagai politik oligarki telah merasuk dalam bangsa Indonesia, hanya untuk merebut kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Hal ini merupakan ancaman dan tantangan kedepan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Adanya upaya yang harus dilakukan untuk mementingkan hal yang sangat prinsipal untuk lebih awal diselesaikan. Rakyat adalah orientasi utama dalam pembangunan bangsa ini. Dengan demikian, begitu banyak cara yang telah dilakukan oleh pemikir bangsa untuk menghalangi berbagai upaya ketidakbenaran yang dilakukan oleh beberapa oknum yang ingin merebut kekuasaan hanya untuk kepentingannya sendiri.<sup>21</sup>

Setelah reformasi, peran partai politik bisa didapati dalam pelaksanaan fungsi di berbagai organisasi politik, dan masing-masing melakukan sebagai sistem multi-partai dan hal itu menjadi satu langkah baru terhadap setiap partai politik untuk melakukan tugasnya.<sup>22</sup> Dalam tatanan pemerintahan yang baik akan selalu melahirkan kebijakan yang baik dan tentunya harus membutuhkan partai oposisi yang konstruktif. Partai oposisi menjadi bagian yang sangat penting karena merupakan alternatif dari keinginan bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Hadirnya partai oposisi dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan politik yang terjadi di era reformasi akan melambangkan dan membangun kedudukan partai oposisi di negara Indonesia. Sistem pemerintahan yang sementara berkembang, akan menjadi implikasi besar kedepannya apabila selalu mengedepankan partai oposisi sebagai satu langkah pasti untuk mendorong maju

<sup>18</sup> Ubaidila Badrun. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016): 26.

<sup>19</sup> Muh. Imam Hasmar dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara

Islam." *Siyastuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyastah Syar'iyah Volume 2*, no. 2 (2020): 329-340.

<sup>20</sup> Suryanto. *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia. 2018): 437.

<sup>21</sup> Endik Hidayat dkk. "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Politik Volume 4*, no. 1 (2018): 54-86.

<sup>22</sup> Herlina Amir. *Partisipasi Partai Politik Dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, Gowa, 2019).

dan berkembangnya negara Indonesia. Sistem pemerintahan jangan menggunakan partai oposisi yang destruktif, namun mengedepankan oposisi yang konstruktif untuk keberlangsungan demokrasi yang lebih baik. Melihat demokrasi sebagai kunci utama dalam memahami sistem politik lebih baik, maka hadirnya partai oposisi sebagai pengontrol yang baik untuk menjawab apapun yang terjadi di dalam bangsa ini.<sup>23</sup>

Salah satu prinsip yang membedakan negara demokrasi terhadap negara otoriter adalah semakin kuatnya partai oposisi karena dapat menjadi *check and balances* dalam keberlangsungan sistem demokrasi. Dengan demikian, pengklaiman terhadap pemerintah akan menjadi negara yang menjalankan kekuasaannya diluar dari tupoksinya, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, oposisi menjadi prinsip terpenting dalam menyumbangkan gagasan kritik terhadap pemerintah dan akan berdampak pada stabilitas yang kondusif dalam pengelolaan negara. Disaat partai oposisi sudah menjadi peran utama dalam memberikan sumbangsi gagasan kepada pemerintah maka, langkah selanjutnya yang dipikirkan adalah adanya implikasi kebaikan yang diperoleh, dan juga dampak yang baik untuk negara demokrasi kedepan.<sup>24</sup> Implikasi partai oposisi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dapat menjadi hal yang baik terhadap rakyat. Sebab, dampak yang di dapatkan dari pemerintahan adalah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan yang di berikan kepadanya sebagai bentuk tanggungjawabnya. Sebab, titik temu kemaksimalan oposisi dalam berkerja maka dapat ditemukan konklusinya adalah setiap rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan.<sup>25</sup>

Perspektif siyasah syar'iyah terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dipahami sebagai suatu gerakan politik islam dalam konteks keindonesiaan, bahwa ideology dalam gerakan islam memuat tentang suatu keberpihakan yang benar terhadap keberlangsungan sistem politik islam sekarang.<sup>26</sup> Diawal masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap negara Indonesia, bahwa setiap rakyat selalu ditekankan akan pentingnya keteguhan terhadap agama bangsa dan negara. Sehingga pada awal abd ke-20, masyarakat muslim berhasil memperjuangkan pergerakan politik untuk kepentingan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>27</sup> Siyasah syar'iyah dapat berhubungan langsung dengan kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dalam kehidupan bernegara yang termasuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat dilihat dalam sistem legislatif akan menjadi prinsip terpenting dalam demokrasi Indonesia. Memahami

<sup>23</sup> Munadi. "Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia." *Jurnal Resolusi Volume 2*, no. 1 (2019):1-20.

<sup>24</sup> Bedjo dan Sukarno. "Peran Oposisi Sebagai Check and Balance Dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Systems Volume 23*, no. 1 (2011): 1-13.

<sup>25</sup> A. Indrearawati . *Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum, Gowa, 2021).

<sup>26</sup> Burhanudin Rabani dan Nila Sastrawati. "Kebangkitan Islam Dalam Sistem Politik di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah Volume 3*, no. 1 (2021): 41-53.

<sup>27</sup> A. M. Fatwa. *Demokrasi Teistis*. (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012): 237.

dari sisi pandangan islam, bahwa demokrasi adalah substansi dari negara itu sendiri. Dimana, adanya kolerasi antara negara demokasi dan negara yang menerapkan sistem khilafah.<sup>28</sup> Artinya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh rakyat harus dilakukan secara musyawarah, agar nilai-nilai dari keislaman selalu ada dalam konsep bernegara demokrasi. Sebagaimana terdapat dalam QS. Asy-Syura/42:38.

*"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi)seruan Tuhan dan melaksanakan shalat sedang urusan mereka akan diputuskan dengan cara musyawarah antara mereka dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka."*<sup>29</sup>

Pada ayat tersebut memberikan pemaknaan bawah setiap kaum muslimin akan selalu memenuhi panggilan Allah swt, dan segala urusan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan juga secara kebijakan yang ingin diputuskan akan dibicarakan secara musyawarah untuk mengambil satu kesepakatan yang baik dan benar. Dan hal demikian, tidak diperbolehkan bagi setiap orang yang mengambil keputusan secara otoriter atau sepihak saja.<sup>30</sup>

Terdapat dalam kajian Siyasa Syar'iyah, badan legislatif dapat dimaknai sebagai kekuasaan pemerintahan dalam konsep islam untuk menetapkan hukum. Pandangan kaum muslimin tidak akan menetapkan hukum yang dapat diberlakukan terhadap umat islam. Tugas Siyasa Syar'iyah dalam penetapan hukum, hanya untuk keberlangsungan umat islam demi kemaslahatan pada kehidupan yang lebih baik.<sup>31</sup> Agama harus menjadi ukuran terpenting dalam pengelolaan negara, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Sinergitas antara agama dan negara akan selalu menyingkirkan pada hal-hal yang buruk dan juga kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk merusak negara dengan selalu merebut kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Sedangkan dalam konsep islam, membentuk masyarakat untuk pentingnya mengelola negara dengan prinsip-prinsip nilai islam itu sendiri.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

Kedudukan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan kontribusi besar pada bangsa dan negara. Sebab, berbagai langkah yang dilakukan dalam menerapkan prinsip check and balances dapat memberikan stabilitas yang kondusif terhadap jalannya sistem demokrasi Indonesia. Upaya mengontrol dan mengawal yang dilakukan oleh partai oposisi adalah peran penting yang menjadi hal utama dalam memberikan kritik sebagai langkah untuk mengimbangi proses perjalanan sistem demokrasi. Oleh karena itu, peran utama yang sudah dilakukan oleh partai oposisi dapat menjadi dampak baik terhadap keberlangsungan demokrasi Indonesia. Dalam keberlangsungan demokrasi, partai

<sup>28</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinajuan Siyasa Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah volume 2*, no. 1 (2021): 170-180.

<sup>29</sup> Kementerian agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Tasdiqiyah, 2015): 454.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2014): 511.

<sup>31</sup> Siska dkk. "Nilai-nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah Volume 2*, no. 2 (2021): 454-471.

<sup>32</sup> Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi Dalam Pandangan Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah Volume 2*, no. 3 (2020): 551-560.

oposisi harus memposisikan peran dan fungsinya pada pengontrolan terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga dampak yang menjadi harapan terhadap keberlangsungan demokrasi dapat dikonfirmasi dalam prinsip check and balances yang dilakukan oleh partai oposisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Admojo, Tuswojo. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014". *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016).

Bedjo, dan Sukarno. "Peran Oposisi Sebagai Check and Balance Dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Systems* 23, no. 1 (2011).

Bernardinus, Putra Benartin dan Paulus Wisnu Yudhoprakosa. "Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial DI Indonesia." *Jurnal Gloria Justitia* 1, no. 2 (2021).

Burhanudin, Rabani dan Nila Sastrawati. "Kebangkitan Islam Dalam Sistem Politik di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).

Darmawati, dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

Dedi, Zulkarnain Pratama. "Koalisi Semu Partai Oposisi di Indonesia" *Jurnal Transformativa* 1, no.1 (2015).

Endik, Hidayat dkk. "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Content* 4, no. 1 (2018).

Firman Nur. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal ML* 42, no. 2 (2016).

Haerani, Pratiwi dkk. "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kec. Segiri Kab. Pangkajene dan Kepulauan." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).

Hamsar, Imam dan Kurniati. "Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam." *Jurnal Siyastuna* 1, no. 2 (2020).

Mei, Susanto. "Pelebagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia". *Jurnal Academia* 4, no. 1 (2012).

Munadi. "Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia." *Jurnal Resolusi*

2, no. 1 (2019)

Nurekasari, dan Hamzah Hasan. "Tinajuan Siyasa Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).

Ratih, Wardhani dan Kamarudin. "Peran Oposisi Yang Dimainkan Partai Islam di Era Reformasi (Studi Kasus: Peran Oposisi PKS Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla)". *Jurnal Of Social Sciences and Humanities* 1 no. 1 (2021).

Siska, dan dkk. "Nilai-nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

Syafriyadi. "Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal UIR Law Review* 1, no.1 (2017).

Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

### **Buku**

Abraham, Amos. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005.

Abdul, Wahid. *Hukum dan Oposisi*. Bandung: Edisi Pertama Penerbit Tarsito, 2013.

Kancang Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana Penada Media Grup, 2015.

Kementrian agama RI. *Al-Qur'an dab Terjemahnya*. Bandung: PT. Tasdiqiyah, 2015.

Muhammad, Fatwa. *Demokrasi Teistis*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, Cetakan Ke-7 2014.

Suryanto. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Penerbitu Pustaka Setia. Cetakan Ke-1 2018.

Suparman, Marzuki. "Politik Hukum." Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2014.

Ubaidila, Badrun. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

### **Skripsi**

A, Indrearawati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2021.

---

Amir, Herlina. "Partisipasi Partai Politik Dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, 2019.